



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

Jalan Pattimura No. 6 Telp (0761) 22921 Fax. (0761) 23191
PEKANBARU - 28131
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat, dan Karunia Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diselesaikan.


Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau maka seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai Pedoman Kerja dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan demi terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan yang tangguh, berdaya saing dan lestari di masa yang akan datang.

Penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam upaya tercapainya rencana kerja yang akuntabel dan transparan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata atas nama seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, Februari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU


YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/lvc
NIP. 19710417 200212 1006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 43

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dab Fungsi Perangkat Daerah 47

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 51

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 78

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 95

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 95

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 97

3.3 Program dan Kegiatan 99

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 128

BAB V PENUTUP 158

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.29)..... 8

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 44

Tabel 3 Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis 48

Tabel 4 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun Periode 2025 52

Tabel 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 79

Tabel 6 Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Perikanan Tahun 2025 98

Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau..... 103

Tabel 8 Capaian Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2025 129



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR **23** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 23

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau disusun berpedoman pada Renstra Perangkat daerah dan (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2025 melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan;

Meliputi (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, serta (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis

gambaran pelayanan Perangkat Daerah, dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;

Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir; dan

6. Penetapan.

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan proses penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berdasarkan PERKADA tentang RKPD 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2024-2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja (Renja) kedalam program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengacu pada RPJMD Provinsi Riau dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan **Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan**, yang dijadikan dasar hukum dalam penyusunannya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 74);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 22).
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3).
14. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22).
15. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1900/XII/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan **Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau** adalah untuk menjabarkan perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2025 yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Renstra 2025 – 2026 melalui program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan **Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan** Provinsi Riau sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan capaian untuk Tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan.
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional.
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan:
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif atas permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi perangkat daerah. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi PD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Pada Tahun 2023 memiliki program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 7 (tujuh) Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 3 (Tiga) Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 4 (Empat) Kegiatan;
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 2 (dua) Kegiatan;
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan 2 (dua) Kegiatan;
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 2 (dua) kegiatan;

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.29)

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja ujuan,Sasaran,Program, (Outcome) dan Kegiatan (Out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2024	Satuan	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Yang Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					SEKRETARIAT										
3	25	1	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	0	0	100	0	100	1
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi									
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	286	Orang	286	143	143	100	143	429	3
3	25	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola									
3	25	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	200	Laporan	14	200	100	50	7	121	4,3214

3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi									
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	10	5	5	100	5	15	0,75
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	56	Paket	29	15	15	100	15	45	0,7627
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567	Laporan	347	155	155	100	155	515	0,8759
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	132	Paket	85	46	46	100	46	92	0,5198
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi									
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	53	Laporan	29	4	4	100	4	4	0,75
3	25	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	141	Laporan	88	44	44	100	44	132	3
3	25	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan									
3	25	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	Jenis	21	14	14	100	14	37	0,7708
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan									

3	25	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	77	Jenis	41	27	27	100	27	82	0,7664
3	25	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	0	278	278	100	278	556	1
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	9	1	1	100	1	3	3
						Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	22	%	14	20	0	100	0	14	0,6364
3	25	2			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)	223.068,85	Ha	2	81.554	18.542	22,74	223.418,85	223.426	1,0016
3	25	2	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)									
3	25	2	1.01	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2,00	Ha	2	18.539	18.539	100	205.595,64	567.644	2,5326
3	25	2	1.01	3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	7	Ha	7	3	3	100	6	14	0,875

3	25	2	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Izin yang Diterbitkan									
3	25	2	1.02	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1	Rekomedasi	0	0	0	0	0	0	0
3	25	2	1.02	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	16	Rekomenda si	0	0	0	0	9	9	0,5625
3	25	2	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan									
3	25	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	140	Orang	0	0	0	0	90	90	0,6429
3	25	2	1.03	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	14	Kelompok	0	0	0	0	9	9	0,6429
					BIDANG TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan(Ton)	308.327,84	308.327,84	270.544,31	296.394,57	260.506,98	93,55	308.327,84	578.872	1,8775

3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	157.199,87	157.199,87	134.972,83	152.105,79	135.773,42	89,26	157.199,87	292.173	1,8586
3	25	3	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan									
3	25	3	1.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2	Dokumen	0	1	1	100	1	2	1
3	25	3	1.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2740	Unit	2.740	2283	2283	100	1520	4995	1,2617
3	25	3	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan									
3	25	3	1.02	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	112.286	Unit	112.286	0	0	0	0	0	0
3	25	3	1.02	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	98	Unit	98	364	364	100	45	491	3,3176
3	25	3	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah perizinan berusaha perikanan tangkap yang diterbitkan untuk kapal perikanan									

3	25	3	1.03	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	0	1	1	100	100	1	1
3	25	3	1.03	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	220	Rekomendasi	220	150	150	100	170	320	1,8824
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(ton)	131.379,52	131.379,52	121.485,31	126.344,71	124.733,54	98,72	131.379,52	252.865	1,9247
3	25	4	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah perizinan berusaha perikanan budidaya di Laut sampai Dengan 12 Mil yang									
3	25	4	1.02	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1	Rekomendasi	0	1	0	0	0	0	0
3	25	4	1.02	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10	Rekomendasi	0	0	0	0	10	10	1
3	25	4	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah									

3	25	4	1.04	2	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200	Rekomenda si	0	100	0	0	100	100	0,5
3	25	4	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan									
3	25	4	1.05	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10	Unit	5	5	0	0	5	5	0,25
3	25	4	1.05	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	33	Unit	33	12	12	100	17	31	0,4493
3	25	4	1.05	6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	31	Dokumen	16	1	1	100	1	2	2
3	25	4	1.05	7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	280	Orang	0	115	115	0	165	280	1
					Bidang P2HKP										
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan (Ton)	19.738,45	19.738,45	16.312,77	17.944,05	25.725,26	143,36	19.738,45	52364	2,6529
3	25	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil yang diterbitkan									
3	25	6	1.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	1	1	0	1	1	0	0	1	1

3	25	6	1.01	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12	12	0	0	0	0	7	7	0,5833
3	25	6	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan									
3	25	6	1.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	4	12	0	1	0	0	4	5	0,4167
3	25	6	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Perikanan Yang Tersedia									
3	25	6	1.03	1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	2	0	1	1	100	1	2	50
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelanggaran yang ditangani (%)	16	16	0	18	18	100	16	16	112,5
3	25	5	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan									

3	25	5	1.02	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	300	Dokumen	0	100	0	0	200	200	33,33
3	25	5	1.02	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	300	Dokumen	22	20	20	0	200	242	33,33
3	25	5	1.02	3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	300	Dokumen	0	100	0	0	200	200	33,33
					UPT.PSDKP WIL 1										
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	1	100	100	100	10000
3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi									
3	25	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12	Stel	12	0	0		0	0	0
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi									
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	8	9	9	100	3	17	25
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	10	16	16	100	5	15	25
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	10	5	5	100	5	15	25

3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39	Laporan	39	24	24	100	21	67	27,27
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi									
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	8	4	4	100	4	12	100
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara									
3	25	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	5	2	2	100	2	5	25
3	25	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	2	1	0	100	1	2	100
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	16	16	16	100	16	32	33,33
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	'Persentase Pelanggaran yang ditangani (%)	16	16	20	18	0	100	16	36	112,5
3	25	5	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi									
3	25	5	1.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	58	Dokumen	17	55	55	100	50	150	31,65
3	25	5	1.01	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	60	Dokumen	0	9	9	100	30	39	50
					UP.PSDKP WIL 2		458	458							0
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	100	100	100	100	200	100

3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi									
3	25	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9	Paket	9	0	0	0	0	0	0
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)									
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	Paket	26	6	6	100	6	32	25
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	10	5	5	100	5	15	25
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	5	2	2	100	2	7	25
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22	Laporan	22	12	12	100	12	36	26,09
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi									
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	9	5	5	100	5	14	100
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara									
3	25	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	5	2	2	100	2	6	100
3	25	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	13	13	0	0	13	13	433,33
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelanggaran yang ditangani (%)	16	16	3	18	0	100	16	19	112,5
3	25	5	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mil yang diawasi									

3	25	5	1.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	56	161	56	15	15	100	55	120	31,06
3	25	5	1.01	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	60	60	0	3	3	100	30	33	50
					UPT.PSDKP WIL 3										
3	25	1	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	100	0	100	100	200	1
3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi									
3	25	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12	Paket	12	0	0	0	0	0	0
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi									
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33	Paket	33	6	6	100	6	39	25
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	5	5	5	100	5	15	25
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	10	5	5	100	5	15	25
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	20	12	12	100	10	32	25
3	25	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan									
3	25	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	Unit	16	8	8	100	8	24	25
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi									

3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	Laporan	11	7	7	100	7	21	100
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara									
3	25	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	Unit	4	3	3	100	2	6	100
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	0	9	0	0	9	9	100
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	'Persentase Pelanggaran yang ditangani (%)	16	16	20	18	0	100	16	36	112,5
3	25	5	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi									
3	25	5	1.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	58	Dokumen	58	55	51	92,73	75	130	29,26
3	25	5	1.01	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	60	Dokumen	0	30	0	0	30	30	50
					UPT.Budidaya Perikanan										
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	10000%	100%	100%	100%	0	100	100	101	100
3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi									
3	25	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20	Stel	20	0	0	0	0	0	0
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi									

3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	6	6	100	6	16	25
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	10	5	5	100	5	15	25
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	8	4	4	100	4	12	25
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51	Laporan	51	21	21	100	21	63	22,58
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi									
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	36	25	18	100	18	54	100
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara									
3	25	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	Unit	10	5	5	100	5	12	25
3	25	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	4	0	0	0	0	0	0
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	74	Unit	74	3	3	100	37	41	34,26
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	509.001,54	509.001,54	121.485,31	126.344,71	124.733,54	100	131.379,52	252865	24,82
3	25	4	1.05		Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan									

3	25	4	1.05	3	Penyediaan PraSarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota		8	Unit	8	3	3	100	2	5	18,18
3	25	4	1.05	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota		17	Jenis	17	7	7	100	8	15	25
3	25	4	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan									
3	25	4	1.06	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6	Unit	0	3	0	0	3	3	50
3	25	4	1.06	2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6	Unit	0	7	0	0	3	3	50
					UPT.PMHP										
3	25	1	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	0	100	100	101	100

3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)									
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	6	7	7	100	5	16	33,33
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4	4	4	100	4	12	33,33
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	6	6	100	4	20	33,33
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi									
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	Laporan	20	10	10	100	10	30	100
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara									
3	25	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	unit	3	3	3	100	3	8	25
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	0	9	0	0	9	9	0
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan (Ton)	68.825,06	68.825,06	16.312,77	17.944,05	25.725,26	100	19.738,45	36051,2	26,07
3	25	6	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan									

3	25	6	102	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	22	36	22	1	1	100	7	15	19,44
					UPT.PELABUHAN PERIKANAN										
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	10000%	100%	100%	100%	0	100	100%	2	100
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)									
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10	1	1	100	5	15	25
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	18	2	2	100	5	31	25
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	10	3	3	100	5	11	25
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	48	29	29	100	30	77	27,78
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi									
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22	Laporan	22	11	11	100	11	33	100
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	30	30	0	0	20	20	60
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara									

3	25	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	3	2	2	100	3	8	100
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	Unit	0	14	0	0	14	14	100
3	25	3			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	603.226,75	603.226,75	147.176,78	152.105,79	135.773,42	100	157.199,87	304377	25,22
3	25	3	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola									
3	25	3	1.06	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3	Unit	3	4	3	100	1	7	33,33
3	25	3	1.06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1	Layanan	0	1	1		1	2	100

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan secara umum telah berjalan dengan baik, akan tetapi karena beberapa hal, permasalahan, maupun regulasi yang ada, maka tidak semua target tercapai. Terdapat tiga program yang belum mencapai target dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memiliki target 81.554 Ha dan Realisasi 18.542 Ha dengan Tingkat Capaian 22,74 %.

Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

- **Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi belum tercapai dikarenakan Izin belum dapat dikeluarkan karena PERDA RTRW yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum disahkan

- **Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- **Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

- **Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memiliki target 152.105,79 dan Realisasi 135.773,42 dengan Tingkat Capaian 89,26 %.

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- **Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap belum tercapai disebabkan tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki target 126.344,71 dan Realisasi 124.733,54 dengan Tingkat Capaian 98,72 %

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

- **Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan**

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

- **Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan**

Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- **Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- **Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut**

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

- **Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

- **Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memiliki target 17.944,05 dan Realisasi 25.725,26 dengan Tingkat Capaian 143,36 %.

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- **Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan Belum ada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Menengah dan besar yang memiliki sertifikat menengah besar.

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- **Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan belum adanya Unit Pengolahan Ikan (UPI) menengah dan besar yang mengusulkan sertifikat standart sesuai kewenangan.

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Menengah Besar yang ada di Provinsi Riau berada di Kabupaten Kampar yaitu Integrated Cold Storage (ICS) yang sampai saat ini belum beroperasi secara optimal karena banyak peralatan / mesin rusak dan dalam proses perbaikan. Integrated Cold Storage (ICS) sudah mengajukan permohonan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), namun kondisi di lapangan belum memenuhi persyaratan sesuai standar Permen KP Nomor 17 Tahun 2019 yaitu harus memiliki Sertifikat Standar yang diverifikasi. Sertifikat standar sedang dalam proses verifikasi oleh Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya.

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

- Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di UPT

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 secara umum telah berjalan dengan baik, dimana semua capaian output kegiatan/sub kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan, dan terdapat tiga program yang telah memenuhi target kinerja. Capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target adalah :

1. SEKRETARIAT dan UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Sekretarian dan UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Ketercapaian hampir semua sub kegiatan mencapai 100%, dengan Sub Kegiatan :

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
- **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
- **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
- **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

2. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

- **Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat**

Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

- **Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- **Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

3. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

- **Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

- **Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- **Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

- **Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

- **Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

4. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- **Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut**

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

- **Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

- **Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

5. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- **Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- **Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

6. UPT.PSDKP WILAYAH I

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

- **Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

7. UPT. PSDKP WILAYAH II

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

- **Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra

akhir periode (2024) sebesar 100%

8. UPT. PSDKP WILAYAH III

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

9. UPT. BUDIDAYA

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- Penyediaan PraSarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan Penyediaan PraSarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

- Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

10. UPT. PMHP

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- **Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

11. UPT PELABUHAN

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

- **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan**

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

- **Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja yang diukur dalam pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan terdiri dari 3 sasaran strategis, dengan 8 indikator sasaran dari 11 program sebagaimana yang dievaluasi dari Renja Perangkat Daerah. Secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran Strategis dalam mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, mengacu pada Indikator Kinerja yaitu meningkatnya Produksi Perikanan dalam hal ini Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Produksi hasil pengolahan perikanan.

2. Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan untuk mewujudkan Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mewujudkan Sasaran strategis ini dengan indikator kinerja yaitu Persentase pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.30)

Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasai Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n-+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n-+1)	
NTN	111	112	113	113	104,54	105,18	113	113	
NTPi	111	112	113	113	98,65	101,37	113	113	
Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	284.974,86	278.450,52	308.327,84	308.327,84	288.606,05	260.506,98	308.327,84	308.327,84	
Jumlah produksi perikanan Budidaya (Ton)	121.485,31	126.344,73	131.389,52	131.389,52	120.319,50	124.733,54	131.389,52	131.389,52	
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	147.176,78	152.105,79	157.199,87	157.199,87	139.309,64	135.773,42	157.199,87	157.199,87	
Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	16.312,77	17.944,05	19.738,45	19.738,45	28.976,91	25.725,26	19.738,45	19.738,45	
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Perturan Perundang-undangan (%)	79,04	82,2	85,48	85,48	89,91	87,59	85,48	85,48	
Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	18	20	22	22	15,00	23	22	22	

Berdasarkan Tabel 2 (T-C 30) Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu:

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan NTPi

NTN adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan yang menentukan tingkat penerimaan nelayan adalah jumlah tangkapan ikan oleh nelayan.

NTN Tahun 2023 memiliki target 112 % dan realisasi 105,18 %, sehingga capaiannya adalah 93,91 % dari target dengan menggambarkan bahwa nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik pada tahun 2023.

NTPi adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nilai tukar pembudidaya ikan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan yang menentukan tingkat penerimaan pembudidaya ikan adalah jumlah hasil yang diterima oleh pembudidaya. Nilai NTPi tahun 2023 memiliki target 112 % dan realisasi 101,37 %, sehingga capaiannya adalah 90,51 % dari target menggambarkan bahwa pembudidaya memiliki tingkat kesejahteraan yang baik pada tahun 2022.

1) Meningkatkan Produksi Perikanan

Meningkatnya Produksi Perikanan, untuk jumlah produksi Kelautan dan Perikanan ini merupakan akumulasi dari produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan hasil produksi pengolahan, dimana capaian jumlah produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar 260.506,98 ton atau 93,55 % dari target sebesar 278.450,52 Ton.

- Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 sebesar 124.733,54 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yakni sebesar 126.344,73 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 98,72 persen. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Budidaya :

1. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri.
2. Pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara mandiri
3. Mendorong tumbuhnya industri penghasil sarana/peralatan/mesin perikanan budidaya di dalam daerah sesuai standar.
4. Pengembangan perikanan budidaya secara intensif dan berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

6. Peningkatan daya saing produk perikanan budidaya melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sehingga proses budidaya dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.
7. Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya yang efisien dan modern.
8. Pengembangan komoditas unggulan.
9. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung.
10. *Backyard Aquaculture* (budidaya di pekarangan) dan pemanfaatan lahan marginal.
11. Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan.

- Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap target 152.105,79 ton realisasi 135.773,42 ton atau 89,26 % belum tercapai angka 100 %, Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Penangkapan, seperti Penerbitan Izin Usaha Penangkapan ikan sebanyak 200 rekomendasi izin. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target perikanan tangkap:

1. Kegiatan Pengembangan Usaha perikanan tangkap.
2. Pembentukan kelompok nelayan tangkap.
3. Pemberian bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

Pada Tahun 2023 Target Produksi Hasil Pengolahan Perikanan (Ton) yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah 17.944,05 ton, namun capaian produksi hasil pengolahan perikanan Tahun 2023 adalah 25.725,26 ton atau 143,36 % mencapai lebih dari 100% dari angka yang ditargetkan.

2) Sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan

Sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan yaitu Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (%) target 82,22% realisasi 87,59 % atau 106,53 %. Tingginya capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan ini karena telah aktif kegiatan pengawasan yang dilakukan

3) Sasaran strategis Meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Persentase Pengolahan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%) target 20%, realisasi 23% atau 115%. Upaya yang perlu dilakukan adalah

percepatan proses integrasi RZWP3K kepada RTRW Provinsi Riau, sehingga legalitas pemanfaatan, dan pengembangan wilayah pesisir di Provinsi Riau dapat berjalan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai fungsi berdasarkan atas asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berkoordinasi dengan instansi terkait pada pemerintahan daerah serta instansi vertikal dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Tugas utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau antara lain bidang administrasi kesekretariat, perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang pengawasan kelautan, bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang implementasikan melalui peningkatan nilai produksi hasil perikanan, peningkatan konsumsi ikan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan atas asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pada pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan fungsi teknisnya di dalam mengkoordinasikan kegiatan, antara lain untuk kegiatan administrasi perencanaan anggaran dan evaluasi dilaksanakan oleh sekretariat, untuk pelaksanaan teknis kegiatan perikanan budidaya dilaksanakan oleh bidang perikanan budidaya, kegiatan perikanan tangkap dilaksanakan oleh bidang perikanan tangkap, untuk kegiatan pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh bidang kelautan dan pengawasan serta pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan yang meliputi pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar dan promosi serta usaha dan logistik.

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang dari aspek teknis dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan spesifikasi teknisnya yaitu unit pelaksana teknis (UPT), meliputi :

1. Budidaya perikanan yang mengurus produksi benih dan pengembangan benih budidaya air payau dan laut.
2. Penerapan mutu hasil perikanan yang mengurus masalah mutu hasil perikanan
3. Pelabuhan perikanan yang menangani kegiatan pelabuhan untuk kapal-kapal perikanan di wilayah perairan provinsi Riau
4. Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah I yang menangani pengendalian dan pengawasan sumberdaya I serta penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indragiri Hilir dengan area sungai

kabupaten Pelalawan.

- 5. Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah II yang menangani pengendalian dan pengawasan sumberdaya II serta penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Merantian Siak
- 6. Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah III yang menangani pengendalian dan pengawasan sumberdaya III serta penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Rokan Hilir dengan Wilayah jelajah Kota Dumai.

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari bidang teknis dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis

Program	Masalah	Isu Strategis	Rencana Perumusan Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none">1. Terjadinya penurunan SDI dan Over Fishing pada beberapa perairan2. Masih dominannya armada penangkapan ikan skala kecil3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelabuhan belum memenuhi standar	Masih rendahnya produktivitas tangkap	<ul style="list-style-type: none">- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap sampai 12 Mill- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap untuk Perairan Umum
Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none">1. Ketersediaan benih dan induk bermutu masih rendah2. Belum berkembangnya skala usaha perikanan budidaya3. Sarana dan prasarana perikanan budidaya belum memadai4. SDM dengan keahlian tertentu dibidang budidaya payau dan laut terbatas5. Komoditas jenis ikan yang dihasilkan terbatas6. Sarana dan prasarana budidaya yang memenuhi persyaratan teknis masih kurang	Masih rendahnya produktivitas budidaya	<ul style="list-style-type: none">- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat
Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none">1. Terbatasnya SDM dan penguasaan teknologi produksi perikanan non konsumsi2. Terbatasnya SDM dan penguasaan teknologi produk olahan hasil perikanan	Rendahnya industrialisasi produk hasil kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

	<ol style="list-style-type: none">3. Terbatasnya akses permodalan dalam mendukung tataniaga pemasaran hasil perikanan4. Biaya operasional monitoring keamanan pangan produk perikanan masih rendah5. Biaya operasional pengujian mutu masih terbatas6. Sarana, prasarana, SDM UPT PMHP masih terbatas		
Kelautan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan2. Sarana, prasarana, SDM dan biaya operasional pengawasan terbatas3. Terbatasnya SDM PPNS yang memiliki sertifikasi4. Rendahnya biaya operasional pengawasan di wilayah Provinsi Riau <p>Sarana dan prasarana UPT masih rendah</p>	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya

Adapun permasalahan – permasalahan yang ada pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pokok diantaranya adalah kemiskinan nelayan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta keterbatasan sarana dan prasarana.
- b. Terjadinya inflasi harga-harga kebutuhan bahan pokok yang menyebabkan harga bahan baku pakan ikan ikut melonjak dan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi.
- c. Masih rendahnya nilai tambah budidaya perikanan karena sebagian besar masih dijual berupa ikan segar, belum berupa hasil industri sebagaimana yang kita harapkan.
- d. Masih terjadi *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir yang menggunakan pukot harimau (Trawl), cantrang, dan lampara yang berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan dan penurunan stok ikan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu:

Tantangan meliputi :

- Sumberdaya Ikan yang semakin terbatas pada zona penangkapan dbawah 4 mil,
- IUU Fishing (Illegal, unreported, unregulated) diantaranya Pelaku usaha melakukan operasional penangkapan ikan tidak dilengkapi dokumen perizinan,
- Ketimpangan Pemanfaatan : Konflik Antar Wilayah Nelayan, Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan
- Kebiasaan nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara one day trip / one day fishing
- Harga pakan ikan relatif mahal sementara 70 persen ongkos produksi untuk pembelian pakan ikan
- Sebagian besar usaha perikanan budidaya masih di skala usaha mikro kecil
- Keterbatasan kewenangan yang tercantum pada permendagri no. 90 tahun 2019 bahwa pembinaan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)/UMKM yang berskala menengah dan besar.
- belum optimalnya peningkatan kapasitas dan stabilitas pemenuhan bahan baku bagi usaha pengolahan ikan yang berkelanjutan, serta belum optimalnya promosi hasil usaha pengolahan unit pengolahan ikan
- Adanya Kewenangan Pengelolaan Ruang Laut 0-12 Mil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki UPT berupa kapal pengawas maupun kendaraan pengawas dalam menunjang kinerja patroli pengawasan dari 0 s/d 12 mil laut sesuai kewenangan yang dimiliki.
- Masih sering terjadi konflik sosial baik yang melibatkan sesama nelayan dalam satu Kabupaten maupun antar Kabupaten

Peluang meliputi :

- Tersedianya SDM sektor Perikanan Tangkap cukup banyak dan terampil serta membuka lapangan kerja baru dengan jumlah nelayan 57.607 orang nelayan.
- Sumber daya ikan masih tersedia di WPP 711 (Laut China Selatan dengan potensi lestari 767.126 Ton) dan WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman dengan potensi lestari 425.444 Ton).
- Potensi Perikanan Budidaya yang sangat besar 237.639,37 ha terdiri dari perikanan air tawar 57.340,12 ha, air laut 149.030,68 ha dan air payau 31.268,57 ha.
- Adanya kampung kakap putih (Kab. Kep. Meranti) dan kampung patin (Kab. Kampar) di Riau
- Dukungan pemerintah bagi kemudahan birokrasi perizinan pengolahan perikanan

- Kebutuhan Benur Udang Vaname di Provinsi Riau mencapai 2,3 milyar ekor/tahun
- Jumlah pelaku usaha pembenihan rakyat (UPR) ikan air tawar cukup tinggi di Provinsi Riau

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Review terhadap RKPD Provinsi Riau tahun 2025 dilakukan untuk membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Untuk merumuskan Program atau Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 upaya dalam menunjang aspek perencanaan yang mencakup semua sector Kelautan dan Perikanan melalui Peningkatan Koordinasi antar Stakeholder, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang lainnya serta pemutakhiran data yang akurat untuk menghasilkan perencanaan yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dibandingkan dengan RKPD Tahun 2025 terdapat beberapa catatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat penyesuaian indikator Program dan penyesuaian kekurangan pendanaan.
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat penyesuaian indikator program kegiatan dan sub kegiatan serta target indikator.
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat penyesuaian indikator program kegiatan dan sub kegiatan serta target indikator. Dari kegiatan ini akan menghasilkan usaha pengolahan skala menengah dan besar.

Hasil review RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 disajikan pada tabel 4.

Tabel. 4
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN PERIODE 2025

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
				(Rp.000)					(Rp.000)
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
SEKRETARIAT									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	28.737.237.011	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	28.737.237.011
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	21.717.440.567	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	21.717.440.567
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	21.717.440.567	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	21.717.440.567
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	350.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	350.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14 Laporan	70.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14 Laporan	70.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	80.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	80.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	1.816.766.873	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	1.816.766.873
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	235.002.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	235.002.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	103.300.873	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	103.300.873
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	1.138.464.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	1.138.464.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11 Dokumen	50.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	3.547.549.151	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	3.547.549.151
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.169.992.995	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.169.992.995
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	1.377.556.156	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	1.377.556.156
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis	160.494.125	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis	160.494.125
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	135.494.125	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	135.494.125
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	27 Jenis	994.986.295	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	27 Jenis	994.986.295

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	267.166.295	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	267.166.295
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	278 Unit	153.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	278 Unit	153.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	574.820.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	574.820.000
BIDANG KELAUTAN PERIKANAN									
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)	280624 Ha	450.132.217	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	#REF!	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)	280624 Ha	450.132.217
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pekanbaru	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)	18.539,1 Ha	450.132.217	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pekanbaru	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)	18.539,1 Ha	450.132.217
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Provinsi Riau	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	144633,73 Ha	250.000.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Provinsi Riau	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	144633,73 Ha	250.000.000
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Riau	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	3 Ha	200.132.217	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Riau	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	3 Ha	200.132.217

BIDANG TANGKAP									
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	140.000 Ton	5.824.143.813	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	140.000 Ton	5.824.143.813
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	3 Wilayah	3.451.561.170	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	3 Wilayah	3.451.561.170
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	180.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	180.000.000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	373.296.828	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	373.296.828
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1760 Unit	2.898.264.342	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1760 Unit	2.898.264.342
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah perikanan tangkap perairan umum daratan yang dimanfaatkan	4 Wilayah	2.159.550.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah perikanan tangkap perairan umum daratan yang dimanfaatkan	4 Wilayah	2.159.550.000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	218.920.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	218.920.000

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	0	1545 0	1.940.630.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	0	1545 0	1.940.630.000
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan	170 Izin	213.032.643	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan	170 Izin	213.032.643
Rekomendasi Perizinan Berusaha Sub sektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk Kapal ukuran diatas 5 GT- 30 GT dan Beroperasi sampai dengan 12 Mill	Provinsi Riau	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 persen	137.307.648	Rekomendasi Perizinan Berusaha Sub sektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk Kapal ukuran diatas 5 GT- 30 GT dan Beroperasi sampai dengan 12 Mill	Provinsi Riau	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 persen	137.307.648
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Penangkapan dan Pengangkut Ikan ukuran diatas 5 GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mill	Provinsi Riau	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen	75.724.995	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Penangkapan dan Pengangkut Ikan ukuran diatas 5 GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mill	Provinsi Riau	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen	75.724.995
BIDANG BUDIDAYA									
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provinsi Riau	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	132712,51 Ton	3.589.505.105	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provinsi Riau	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	132712,51 Ton	3.589.505.105

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 izin	20.000.000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 izin	20.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	20.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	20.000.000
Penerbitan Izin KapalPengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan	3 izin	10.000.000	Penerbitan Izin KapalPengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan	3 izin	10.000.000
Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	10.000.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	10.000.000
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah	100 Rekomendasi	70.000.000	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah	100 Rekomendasi	70.000.000

Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250 Rekomendasi	70.000.000	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250 Rekomendasi	70.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan	5 Kawasan	285.663.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan	5 Kawasan	285.663.000
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.000.000
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Pembudidaya	90 Orang	125.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Pembudidaya	90 Orang	125.000.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	10 Unit	101.663.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	10 Unit	101.663.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	5 Kawasan	3.203.842.105	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	5 Kawasan	3.203.842.105
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SaranaPembudidayaan Ikan di AirPayau dan Air Tawar LintasDaerah Kabupaten/Kota	88 Unit	2.600.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SaranaPembudidayaan Ikan di AirPayau dan Air Tawar LintasDaerah Kabupaten/Kota	88 Unit	2.600.000.000

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	603.842.105	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	603.842.105
Bidang P2HKP									
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Provinsi Riau	Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)	29.845,28	800.066.418,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Provinsi Riau	Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)	29.845,28	800.066.418,00
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil yang diterbitkan	6	50.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil yang diterbitkan	6	50.000.000,00
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Provinsi Riau	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	6 Dokumen	50.000.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Provinsi Riau	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	6 Dokumen	50.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	4 Unit	750.066.418	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	4 Unit	750.066.418

Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan	691.866.418	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan	691.866.418
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Provinsi Riau	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	58.200.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Provinsi Riau	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	58.200.000
BIDANG KP					BIDANG KP				
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Provinsi Riau	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	7 Kasus	119.999.999	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Provinsi Riau	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	7 Kasus	119.999.999
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	245 Pelaku Usaha	20.000.000	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	245 Pelaku Usaha	20.000.000

Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	2 Forum	20.000.000	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	2 Forum	20.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelaku UsahaPerikanan Yang diterawasi	40 Pelaku Usaha	99.999.999	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelaku UsahaPerikanan Yang diterawasi	40 Pelaku Usaha	99.999.999
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Riau	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	39.999.999	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Riau	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	39.999.999
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Riau	Jumlah pelaku Usahapembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau,waduk, rawa, dan genanganair lainnya yang diperiksakepatuhannya sesuaiikewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	60.000.000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Riau	Jumlah pelaku Usahapembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau,waduk, rawa, dan genanganair lainnya yang diperiksakepatuhannya sesuaiikewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	60.000.000
UPT.PSDKP WIL 1									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	378.342.766	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	378.342.766

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	145.555.906	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	145.555.906
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	43.823.906	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	43.823.906
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.032.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.032.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	2.770.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	2.770.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	88.930.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	88.930.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	207.514.560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	207.514.560
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	207.514.560	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	207.514.560
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	25.272.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	25.272.300

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	15.332.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	15.332.300
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	9.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	9.940.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Provinsi Riau	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	7 kasus	396.755.800	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Provinsi Riau	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	7 kasus	396.755.800
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	80	396.755.800	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	80	396.755.800
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	16.760.000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	16.760.000
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha	352.595.800	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha	352.595.800

Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usahapemanfaatan sumber dayakelautan yang diperiksakepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 PelakuUsaha	27.400.000	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usahapemanfaatan sumber dayakelautan yang diperiksakepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 PelakuUsaha	27.400.000
UP.PSDKP WIL 2									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	474.179.467	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	474.179.467
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	223.948.427	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	223.948.427
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	113.561.087	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	113.561.087
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.664.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.664.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.023.340	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.023.340
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	86.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	86.700.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	208.721.040	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	208.721.040
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	208.721.040	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	208.721.040
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	41.510.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	41.510.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	22.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	22.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	19.510.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	19.510.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	7 kasus	587.125.153	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	7 kasus	587.125.153
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku UsahaSumber Daya kelautan danPerikanan sampai 12 Millyang diawasi	80 Pelaku Usaha	587.125.153	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku UsahaSumber Daya kelautan danPerikanan sampai 12 Millyang diawasi	80 Pelaku Usaha	587.125.153

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	47.790.000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	47.790.000
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	180 Pelaku Usaha	539.335.153	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	180 Pelaku Usaha	539.335.153
UPT.PSDKP WIL 3									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	447.968.652	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	447.968.652
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	71.701.896	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	71.701.896
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.357.774	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.357.774
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.728.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.728.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.031.122	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.031.122
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	41.585.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	41.585.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis	58.440.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis	58.440.700
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	58.440.700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	58.440.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	231.515.456	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	231.515.456
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	231.515.456	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	231.515.456
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	86.310.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	86.310.600

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	21.310.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	21.310.600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	60.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	5.000.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	85 PelakuUsaha	595.872.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	85 PelakuUsaha	595.872.000
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	85	595.872.000	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	85	595.872.000
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 Pelaku Usaha	30.000.000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 Pelaku Usaha	30.000.000
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	75 PelakuUsaha	535.872.000	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	75 PelakuUsaha	535.872.000

Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	30.000.000	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	30.000.000
UPT.Budidaya Perikanan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.304.681.989	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.304.681.989
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	4 Jenis	145.098.189	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	4 Jenis	145.098.189
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	42.710.794	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	42.710.794
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.387.395	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.387.395
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	12.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	78.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	78.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	982.308.480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	982.308.480
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	982.308.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	982.308.480
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	177.275.320	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	177.275.320
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	102.275.320	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	102.275.320
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	75.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	132712,51 Ton	2.668.361.012	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	132712,51 Ton	2.668.361.012
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	5 Kawasan	2.668.361.012	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	5 Kawasan	2.668.361.012
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	2.668.361.012	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	2.668.361.012

UPT.PMHP									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	388.448.416	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	388.448.416
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	39.862.064	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	39.862.064
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.972.206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.972.206
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.139.858	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.139.858
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	27.750.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	27.750.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 jenis	289.412.514	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 jenis	289.412.514
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	289.412.514,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	289.412.514,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	59.173.838	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	59.173.838
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	21.023.838	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	21.023.838
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	13.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	13.150.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	25.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Provinsi Riau	Volume Produk hasil olahan perikanan	29.845,28	204.098.582	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Provinsi Riau	Volume Produk hasil olahan perikanan	29.845,28	204.098.582
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan	4 Unit	204.098.582	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan	4 Unit	204.098.582

Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10 kegiatan	204.098.582	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10 kegiatan	204.098.582
UPT.PELABUHAN PERIKANAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	936.482.804	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	936.482.804
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	134.251.355	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	134.251.355
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	16.816.639	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	16.816.639
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.200.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.864.716	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.864.716

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	96.370.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	96.370.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	432.852.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	432.852.800
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	432.852.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	432.852.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	369.378.649	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	369.378.649
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	73.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	73.440.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	147.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	147.850.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	148.088.649	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	148.088.649

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	140000 Ton	200.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	140000 Ton	200.000.000
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kota Dumai	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	1 Unit	200.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kota Dumai	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	1 Unit	200.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	200.000.000
				48.103.401.204					48.103.401.204

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Maka perlu dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024.

Berdasarkan Forum Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat yang terkait melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan.

Dalam prosesnya Forum Perangkat Daerah, dengan mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Sesuai dengan program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang telah diselaraskan dengan usulan prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Ini merupakan langkah awal untuk usulan kegiatan tahun 2025 Kab/Kota bidang kelautan dan perikanan. Maka dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dibentuk suatu tim untuk penyaringan usulan – usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota dirangkum dalam Berita Acara dan disepakati dalam hasil Forum Perangkat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota Provinsi Riau program / kegiatan tahun 2025.

Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Adapun Program / Kegiatan yang prioritas yaitu :

1. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan
2. Pemulihan sumberdaya ikan di perairan umum daratan
3. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
4. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya
5. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan sarana sistem rantai dingin hasil perikanan.

Berikut usulan yang disampaikan oleh kelompok dan anggota masyarakat pemangku kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang akan dituangkan dalam Tabel 7 TC. 32 sebagai berikut :

Table 5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (T-C.32)

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
BIDANG PERIKANAN TANGKAP				
PROGRAM PENGELOLAN PERIKANAN TANGKAP				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan		
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		
	Bengkalis			
	Dusun Tua Meskom RT.001 RW.004 Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	Bantuan Peralatan untuk Perlengkapan Nelayan Jaring Insang 2 Inchi	330 Unit	
	Jl. Dusun Simpang Merpati RT.001 RT,002 Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (<i>Gillnet</i> terakit beserta komponen)	450 Unit	
	Jl. Antelas Dusun Pembangunan RT.002 RW,001 Desa Senderak Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Jaring Udang/ <i>Trammel Net</i>)	250 Unit	
	Jl. Gebat Putra RT.005 RW.003 Desa Senderak Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Pengerih)	100 Unit	
	Jl. Dusun Simpang Merpati RT.002 RT,002 Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Kapal Motor Kayu 5 GT beserta mesin Mitsubishi 4D)	5 Unit	
	SIAK			
	Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring	100 Unit	
	Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit	Bantuan Sarana Alat Tangkap Gombang	20 Unit	
	INDRAGIRI HILIR			
	Parit Simpang RT. 002 Rw. 004 Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 1 GT lengkap dengan mesin	10 Unit	
		Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	200 Piece	

	Desa Perigi Raja Kecamatan Kuala Indragiri	Bantuan Sarana Alat Tangkap Kapal Motor Fiber 1 GT lengkap dengan mesin	3 Unit	
		Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring	150 Piece	
	Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri	Bantuan Sarana Alat Tangkap Kapal Motor Fiber 1 GT lengkap dengan mesin	5 Unit	
		Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring	100 Piece	
	Jl. H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Teritip Kec. Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 1 GT lengkap dengan mesin	10 Unit	
		Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	100 Piece	
	Kelurahan Tagaraja Kec. Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	200 Piece	
	Jl. Tunas Kelapa RT. 004 RW. 004 Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kec. Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 2 GT lengkap dengan mesin	10 Unit	
		Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	100 Piece	
	Bakau Lurus RT. 001 RW. 005 Desa Sungai Teritip Kec. Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 1 GT lengkap dengan mesin	10 Unit	
		Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	200 Piece	
	Desa Lahang Tengah Kec. Gaung	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 1 GT lengkap dengan mesin	5 Unit	
		Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	100 Piece	
	Desa Terusan Kempas Kec. Gaung	Bantuan Sarana Alat Tangkap Sampan Motor 1 GT	20 Unit	
		Bantuan Sarana Alat Tangkap Daging Belat	20 Unit	
	KEPULAUAN MERANTI			
	Desa Kedabu Rapt Kec. Rangsang Pesisir	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	150 piece	
	Desa Melai Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Udang	150 piece	
	Desa Tanjung Kedabu, Kec. Rangsang Pesisir	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	200 piece	
	Desa Anak Setatah Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	150 piece	
	Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	150 piece	
	Desa Bantar Kec. Rangsang Barat	Bantuan Saana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	150 piece	
	Desa Centai Kec. Pulau Merbau	Bantuan Saana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	200 piece	
	PELALAWAN			
	Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	

	Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2 Inchi)	20 Unit	
	Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2 Inchi)	50 Unit	
	Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2,5 Inchi)	50 Unit	
	ROHIL			
	Jl. Sungai Gajah RT 013 / RW 006 Dusun Jaya Kep. Sungai Segajah Jaya, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir	Bantuan 3 Unit Bod Nelayan	3 Unit	
	Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir	Bantuan Mesin 24 HP Lengkap	10 Unit	
	Jl. Kampung Baru Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko	Bantuan Mesin Kapal 30 HP	10 Unit	
	Jl. Baris RT.011 Kep. Sinaboi	Bantuan Mesin Diesel 28 HP	10 Unit	
	Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas	Bantuan Alat Tangkap Nelayan	10 Unit	
	Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir	Bantuan Jaring Penangkapan Ikan	10 Unit	
	Jl. Garuda Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas	Bantuan Kapal Kualuh & Alat Tangkap	10 Unit	
	DUMAI			
		Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	23 Paket	

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan		
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		
	SIAK			
	Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	18 Unit	
	INDRAGIRI HULU			
	Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
	Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Pengadaan Jaring Insang mesh size 4-5 Inchi	48 Unit	
	Desa SukajadiKecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Pengadaan Jala Tebarspesifikasi :Bahan BenangPanjang 3 MeterLebar 6 meterMesh size 3/4 inciUkuran Benang No. 9	16 Unit	
	Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Pengadaan Jala Tebar spesifikasi : Bahan Benang Panjang 3 Meter Lebar 6 meter Mesh size 3/4 inci Ukuran Benang No. 9	12 Unit	
	KEPULAUAN MERANTI			
	Desa Tanjung Kedabu, Kec. Rangsang Pesisir	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (3,5 GT)	2 Unit	
	Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (2 GT)	2 Unit	
	Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (2 GT)	2 Unit	
	Desa Tanah Merah Kec. Rangsang Pesisir	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (3,5 GT)	2 Unit	
	Desa Centai Kec. Pulau Merbau	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (3,5 GT)	2 Unit	
	Desa Kedabu Rapt Kec. Rangsang Pesisir	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (3,5 GT)	2 Unit	
	PELALAWAN			
	Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	

	Desa Pkl. Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
	Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
	Desa Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
	Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Jaring 2 inchi	10 Unit	
	Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Alat tangkap pengilar 1 1/4"	10 Unit	
	Desa Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Alat tangkap pengilar 1 1/4"	10 Unit	
	Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Jaring 2.5 inchi	10 Unit	
	Kel. Langgam Kec. Langgam	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Sungai Ara Kec. Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Jaring 5 inchi	10 Unit	
	Desa Tambak Kec. Langgam	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Alat tangkap pengilar 1.5 inchi	10 Unit	
	Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras	Pengadaan Jaring 2.5 inchi	10 Unit	
		Pengadaan Alat tangkap pengilar 1.5 inchi	10 Unit	
	Desa Terusan Kec. Pkl Kerinci	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Jaring 2.5 inchi	10 Unit	
	Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Bahan Alat Tangkap Pengilar /Gill Net (Ukuran mata jaring 2 inchi)	10 Unit	
	Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Bahan Alat Tangkap Pengilar /Gill Net (Ukuran mata jaring 2 inchi)	20 Unit	
	Kelurahan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Bahan Alat Tangkap Pengilar /Gill Net (Ukuran mata jaring 2 inchi)	10 Unit	
	Desa Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Bahan Alat Tangkap Pengilar /Gill Net (Ukuran mata jaring 2 inchi)	20 Unit	

	Kecamatan Teluk Meranti	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 8 Inchi)	40 Unit	
	Desa Bandar Pesisir Kecamatan Teluk Meranti	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti	Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2 Inchi)	10 Unit	
	Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2 Inchi)	30 Unit	
	PEKANBARU			
	Jl. Raja Panjang RT 02 RW 05 Kel. Tebing Tinggi Okura, Kec. Rumbai Timur.	Pengadaan Kapal Fiber 1 GT dan Mesin beserta kelengkapannya.	12 Unit	
	Jl. Raja Panjang RT 02 RW 05 Kel. Tebing Tinggi Okura, Kec. Rumbai Timur.		10 Unit	
	Jl. Pemuda Ujung Gg. Taufik RT 02 RW 08 Kel. Tirta Siak, Kec. Payung Sekaki.		10 Unit	
	Jl. Kemping RT 04 RW 07 Kel. Lembah Sari, Kec. Rumbai Timur.	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Insang. Ukuran : 1,5 ~ 2.5 inchi	50 Unit	
	Jl. Raja Panjang RT 03 RW 05 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Timur.		50 Unit	
	Jl. Tanjung Batu RT 02 RW 03 Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh		50 Unit	
	Jl. Tanjung Batu No.136 RT 01 RW 03 Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh.		65 Unit	
	Jl. Raja Panjang RT 03 RW 05 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Timur.		50 Unit	
	Jl. Raja Panjang RT02 RW 04 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Timur.		65 Unit	
	Jl. Pesisir Ujung Rt 03 RW 09 Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai		60 Unit	
	Jl. Pangambang RT 03 RW 07 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Timur		80 Unit	
	Jl. Pangambang RT 03 RW 07 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Timur		65 Unit	
	Jl. Pesisir Gg. Hiu RT 01 RW 09 Kel. Meranti Pandak Kec. Pesisir.		55 Unit	
	KAMPAR			
	Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	Jaring Insang	10 Unit	

	Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	Jaring Insang	10 Unit	
	Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	Jaring Insang	10 Unit	
	Desa Danau Lancang Kec, Tapung Hulu	Pengadaan Sampan Dayung Bahan Drum Plastik Beserta Mesin Tempel Sampan Nelayan	10 Unit	
	Desa Danau Lancang Kec, Tapung Hulu	Pengadaan Sampan Dayung Bahan Drum Plastik Beserta Mesin Tempel Sampan Nelayan	10 Unit	
	Desa Danau Lancang Kec, Tapung Hulu	Pengadaan Sampan Dayung Bahan Drum Plastik Beserta Mesin Tempel Sampan Nelayan	10 Unit	
	DUMAI			
	Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
	KUANSING			
		Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan		
	Kecamatan Cerenti	- Perahu Bermotor dan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	10 Paket	
	Kecamatan Cerenti	- Perahu Bermotor dan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	10 Paket	
		Pengadaan Benih Ikan Lokal		
	Kab. Kuantan Singingi	- Benih Ikan Baung	100000 Ekor	
	ROKAN HULU			
	Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jala Ikan 1 dan 2 Inchi,	18 Unit	
		Joran Pancing Sambung 2 dan Reel Pancing Viking ukuran 50/40 dan 50/70	18 Set	
		Tali Pancing PE ukuran 0,20 dan 0,35	18 Set	
		Jaring Bubu Ukuran 3/4 ukuran talu 2 mm	18 ball	
		Tali Pengikat Bbu Merk united uk 2,5 mm	36 gulung	
		Lukah/Penangkap ikan dari bambu	36 Unit	
		Kotak Fiber untuk pengawet ikan	18 Unit	
		Senter kepala cahaya kuning anti air merk LUBY tipe L2903k	18 Unit	
		Pisau Merk Camel	18 buah	
		Jala	10 Unit	
		Jaring Bubu Ukuran 3/4 ukuran talu 2 mm	10 Unit	

		Sterofoam box ikan	10 Unit	
		Jaring	20 ball	
		jala	10 Unit	
		Jaring Pengilar	20 kg	
		Mata Pancing	200 kotak	
		Tali Nilon 1/2 mm	200 ikat	
		Tali Nilon 2 mm	250 ikat	
		Tali Nilon 4 mm	100 gulung	
	Desa Mahato Kec. Tambusai Utara	Jaring pukat 6 inch \$ 0,40	30 ball	
		Jaring pukat 5 inch \$ 0,40 mata malang	30 ball	
		Jaring pukat 4 inch \$ 0,40 mata malang	30 ball	
		Jaring pukat 3 inch \$ 0,28 mata malang	30 ball	
		Jaring Pungilar 4 inch	100 kg	
		Jaring Pungilar 2 inch	100 kg	
		Tali PE*1*	10 ball	
		Tali PE*3*	30 ball	
		Tali PE*4*	30 ball	
	Desa Tanjung Medan Kec. Rokan IV Koto	Perahu Penangkap Ikan	10 unit	
		Mesin Koplit Tanap Kapal Perikanan	10 unit	
		Jala	10 buah	
		Jaring	10 kg	
		Rawai	10 kg	
BIDANG BUDIDAYA				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				
Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan di laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
	SIAK			

	Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung Fiber	5 unit	
	KEPULAUAN MERANTI			
	Desa Bantar Kec. Rangsang Barat	Bantuan Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1 unit	
	Desa Sialang Pasung Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	3 unit	
	Desa Sialang Pasung Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	2 unit	
	Desa Sialang Pasung Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	1 unit	
	Desa Bantar Kec. Rangsang Barat	Bantuan Alat Tangkap Gumbang Sarana Pendukung Budidaya KJA	10 unit	
	INDRAGIRI HULU			
	Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA) dan benih ikan patin Spesifikasi : Konstruksi besi Galvanis Ukuran 4x5 meter Benih ikan Patin ukuran 8-12 cm	10 Paket	
	DUMAI			
	Desa Sialang Pasung Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	2 unit	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan		
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	INDRAGIRI HILIR			
	Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Inhil	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Udang Vaname Semi Intensif	1	
	Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kab. Inhil	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Udang Vaname Semi Intensif	1 Paket	
	Desa Pengalihan kecamatan Keritang	Bantuan Sarana Keramaba Jaring Apung (KJA) Air Tawar	2 Paket	
	KEPULAUAN MERANTI			
	Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air tawar	1 Paket	
	Desa Mengkirau Kec. Tasik Putri Puyu	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air tawar	1 Paket	

	Desa Padang Kamal Kec. Pulau Merbau	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air tawar	1 Paket	
	Desa Mengkopot Kec. Tasik Putri Puyu	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air tawar	1 Paket	
	Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air payau (Benur udang)	1 Paket	
	PELALAWAN			
	Desa Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci	Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA)	1 Paket	
	Kel. Langgam Kec. Langgam	Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA)	1 Paket	
	Kec. Pangkalan Kuras	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Kec. Pangkalan Kuras	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Kec. Bandar Seikijang	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Kelurahan Sorek Satu, Pkl. Kuras	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	Bantuan Bibit Udang Vaname dan saprokan tambak	2 Paket	
	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	Bantuan Bibit Udang Vaname dan saprokan tambak	2 Paket	
	Desa Banjar Panjang	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
	Desa Banjar Panjang	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
	Desa Silikuan Hulu	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
	Desa Air Hitam	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
	Desa Bukit Jaya	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
	Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
	Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
	ROHIL			
	Jl. Kampung Baru Rt/Rw: 021/005 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko	Bantuan Pengadaan Spat Kerang	500 Kaleng	
	Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko	Bantuan Pengadaan Spat Kerang	1000 Kaleng	
	KAMPAR			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Ranah, Desa Bukit Ranah, Kel. Air Tiris	Bantuan Sarana Jaring Apung (KJA)	4 Unit	

	Desa Pulau Terap, Empat Balai, Ranah, Air Tiris, Sendayan	Tiang Panjang Untuk Keramba	8 Unit	
Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan tersedia	300 Kg	
	Desa Lereng Kecamatan Kuok	Bantuan Calon induk Ikan Patin untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
	Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Patin untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
	Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Lele untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
	Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Lele untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
	Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Lele untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
	Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Lele untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)		
	DUMAI			
	Kel. Sungai Geniot Kec. Sungai Sembilan	Bantuan Pompa Meriam 8"	3	
	Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan	MCPi-70-100 KG/JAM *Full control" Mesin Pencetak	1 unit	
		Mixer Pencampur 400 kg/jam Medium	1 unit	
	Kel. Sungai Geniot Kec. Sungai Sembilan	Terpal HDPE	12 roll	
		Kincir Air	8 unit	
		Benur	300000 ekor	
	Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur	Hiblow Air Pum (HP 200)	20 unit	
		Bak Fiber (uk. 2m X 1m X 0.4m)	20 unit	
	Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur	Mesin Pembuat Pakan	1 unit	
	Kel. Bukit nenas Kec. Bukit Kapur	Mesin Pembuat Pakan	1 unit	
	Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur	Kolam Bulat Terpal Diameter 2	40 unit	
		Benih Ikan Lele	50000 ekor	
	Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai	Terpal HDPE	10 roll	
		Kincir Air	5 unit	

	Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai	Terpal HDPE	10 roll	
		Kincir Air	5 unit	
	Kel. Mundam Kec. Medang Kampai	GENSET SILENT 20 KVA	1 unit	
		Terpal HDPE	2 roll	
	Kel. Mundam Kec. Medang Kampai	Kolam Bulat Terpal Diameter 2	5 unit	
		Benih Ikan Lele	10000 ekor	
	Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan	Keramba (UK. 3 X 4) Jaring Tancap	15 unit	
		Benih Ikan Lele	50000 ekor	
	Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan	Terpal Kolam Ikan Air Tawar	2 roll	
		Benih Ikan Lele	50000 ekor	
	Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur	Keramba (UK. 3 X 4) Jaring Tancap	15 unit	
		MESIN POMPA UDARA/AERATOR (HP 100)	5 unit	
		BAK FIBER (uk. 2m X 1m X 0.5m)	12 unit	
		Benih Ikan Nila	10000 ekor	
		Benih Ikan Gurami	10000 ekor	
	Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur	MESIN POMPA UDARA/AERATOR (HP 100)	3 unit	
		KOLAM BULAT TERPAL DIAMETER 3	10 unit	
		Benih Ikan Nila	10000 ekor	
		Benih Ikan Gurami	10000 ekor	
	Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur	BAK FIBER (uk. 2m X 1m X 0.5m)	15 unit	
		MESIN POMPA UDARA/AERATOR (HP 100)	3 unit	
		Benih Ikan Nila	5000 ekor	
		Benih Ikan Gurami	5000 ekor	
	Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur	KOLAM BULAT DIAMETER 3	5 unit	
		FILTER AIR TABUNG FIBER	2 Paket	
		Benih Ikan Nila	10000 ekor	
		Benih Ikan Gurami	10000 ekor	
	Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Dumai Timur	BAK FIBER (uk. 2m X 1m X 0.5m)	15 unit	
		MESIN POMPA UDARA/AERATOR (HP 100)	3 unit	

		Benih Ikan Nila	10000 ekor	
		Benih Ikan Gurami	10000 ekor	
	ROKAN HULU			
	Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Babussalam Kec. Rambah	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Koto Tinggi Kec. Rambah	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Patin	1 Paket	
	Desa Babussalam Kec. Rambah	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Sungai Kumango Kec. Tambusai	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Kabun Kec. Kabun	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Pagaran Tapah Kec. Pagaran Tapah Darussalam	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
	Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Nila dan Patin	1 Paket	
BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN				
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)		
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
	PELALAWAN			
	Desa Teluk, Kecamatan Kuala Kampar	Bantuan Bibit Mangrove	1 Hektar	
	Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar	Bantuan Bibit Mangrove	1 Hektar	
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Peralatan Pengolahan yang difasilitasi		

	KAMPAR			
	Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa	IQF (Individual Quick Freezing)	1 unit	
	Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa	Detector Logam	1 unit	
	Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa	Bangunan IQF	1 unit	
Pemberikan insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			2 Paket	
	Dumai			
		Jumlah unit usaha perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberikan insentif dan fasilitasi		
		Alat pengolahan dan pemasaran	2 PAKet	
	KUANSING			
	Kab. Kuantan Singingi	Pemberian Insentif untuk Pemasar Produk Perikanan Lintas Kabupaten/Kota		
	Kab. Kuantan Singingi	- Insentif untuk Pemasar Ikan	10 Unit Usaha	
		Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		
	Gunung Toar	- Pengadaan Bantuan Pengolahan Hasil Perikanan Untuk Poklasar	12 Unit Usaha	
UPT.PELABUHAN PERIKANAN				
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola		
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		
	INDRAGIRI HILIR			

	Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1 Unit	
UPT.BUDIDAYA PERIKANAN				
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan		
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	KAMPAR			
	Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu	Pengadaan Bibit Ikan Baung dan Mahseer/Gadi Untuk Restocking		
	Desa Deras Tajak Kec. Kampar Kiri Hulu	Pengadaan Bibit Ikan Baung dan Mahseer/Gadi Untuk Restocking	50000 Ekor	
	Desa Tanjung Belit Selatan Kec. Kampar Kiri Hulu	Pengadaan Bibit Ikan Baung dan Mahseer/Gadi Untuk Restocking	50000 Ekor	
	KUANSING			
	Sentajo Raya	Pengadaan Sarana Pembenihan Pada UPTD BBIPP Teso (Pengadaan Calon Induk Ikan Nila dan Pakan Ikan)	5 Paket	
		- Calon Induk Ikan Nila	2000 Kg	
		- Pakan Induk	300 Kg	
		- Pakan Benih	1 Paket	
		Peralatan Pembenihan		
	Kuantan Tengah	Pengadaan Sarana Pembenihan Pada UPTD PBPPP Sungai Jering (Pengadaan Calon Induk Ikan,Pakan Ikan dan Peralatan Pembenihan)		
		- Calon Induk Ikan Lele	100 Kg	
		- Pakan Induk	700 Kg	
		- Pakan Benih	300 Kg	
		Peralatan Pembenihan	1 Paket	

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	KUANSING			
	Sentajo Raya	Pengadaan Prasarana Pada UPTD BBIPP Teso		
		- Pembangunan Pagar Keliling UPTD BBIPP Teso	300 Meter	
	Kuantan Tengah	Pengadaan Prasarana Pada UPTD PBPPP Sungai Jering		
		- Pembangunan Pagar Keliling UPTD PBPPP Sungai Jering	150 Meter	
		- Rehabilitasi Kolam UPTD PBPPP Sungai Jering	300 M²	
		- Pembangunan Pagar Kolam Induk Ikan	300 Meter	

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (menjabarkan Visi Presiden) Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong, yaitu terdiri dari 4 (Empat) misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
Melalui Peningkatan Daya Saing SDM Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
Melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Melalui Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
Melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan:

1. Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset KP
 - Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
 - Inovasi dan riset KP menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional
 - Pengelolaan sumberdaya perikananbudidaya dan tangkap optimal;
 - Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat;
 - Pengawasan pengelolaan SDKP menguat
 - Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat;
 - Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Meningkat

Dalam upaya mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanjutkan pelaksanaan 5 program prioritas berbasis Ekonomi Biru di tahun 2024 ini. Strategi ekonomi biru merupakan upaya Indonesia dalam menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan ekonomi, merevitalisasi kesehatan laut, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan. Lima program ekonomi biru yaitu :

1. Perluasan kawasan konservasi laut
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan.

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan:

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 juta ton, dan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun
2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional Meningkatkan produksi perikanan tangkap menjadi 10,10 juta ton, dan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8 miliar pada 2024
3. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan rata-rata 5% dan 10% per tahun (target SDGs), serta produktivitas komoditas 5% per tahun

Pembangunan Kelautan dan Perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi Kelautan dan Perikanan pada PDB daerah, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005- 2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau diarahkan pada kualitas pemerintahan yang baik. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Riau dilakukan melalui pengembangan usaha perikanan budidaya, khususnya budidaya perikanan air tawar melalui pengembangan kawasan sentra-sentra produksi. Pengembangan perikanan tangkap di laut dan perairan pantai maupun di perairan umum, saatnya untuk dibatasi. Kegiatan pengembangan untuk bidang tersebut adalah pengembangan nilai tambah produk hasil perikanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Renja merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Provinsi Riau. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran Renja dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (*impact*) yang terukur, relevan dengan yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 2 (dua) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2026.

Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan dan kelautan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ke depan berdasarkan tujuan dan sasaran, dikembangkan lebih lanjut pada Tabel 6.

Tabel 6. Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Perikanan Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Base Line 2022	Target 2025
1	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,54	105
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98,65	106
	1.1 Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton)	259.629,13	272.712,51
		1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	120.319,50	132.712,51
		2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	139.309,64	140.000,00
		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	28.976,91	29.845,28
	1.2 Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	89,91	89,91
	1.3 Meningkatkan Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	15	22

Guna pencapaian sasaran indikator Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 pada Tabel 6. Memperlihatkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provibsi Riau mendukung misi yang ketiga yakni mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Dalam mencapai tujuan tersebut kepala daerah menetapkan sasaran Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan perikanan. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kepala daerah, maka Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menetapkan tujuan pembangunan perikanan dengan memperkuat pembangunan perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya produksi budidaya ikan, penangkapan ikan dan meningkatnya status keamanan produk olahan maupun segar asal ikan dan laut, serta tersedianya sumberdaya ikan yang berkelanjutan dan lestari.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan produksi perikanan adalah dengan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Peningkatan Produksi Hasil Olahan Perikanan, Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan SDKP, Meningkatnya Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk mencapai dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Untuk tahun 2025 terdapat 6 program kegiatan, yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Provinsi Riau mempunyai sumberdaya perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik untuk usaha perikanan tangkap maupun usaha budidaya serta pengolahan hasil perikanan, pada perikanan tangkap yaitu perairan umum dan perairan laut (kawasan pesisir). Potensi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan penangkapan dan budidaya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/subkegiatan tahun perencanaan 2025 yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat pada tingkat pemanfaatan budidaya laut hanya sebesar 1,26 %, budidaya payau sebesar 9,36 % sedangkan budidaya tawar sebesar 14,10 %, masih rendahnya tingkat pemanfaatan potensi usaha budidaya di wilayah laut ini disebabkan tingginya biaya produksi dibandingkan dengan wilayah tawar atau payau. selain itu juga tingkat kesejahteraan pelaku perikanan khususnya pada sektor budidaya jika dilihat dari angka Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) rata-rata setiap tahunnya masih mencapai angka dibawah 100.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Wilayah penangkapan ikan perairan laut di Provinsi Riau berada pada 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yakni WPP-571 dan WPP-711. Perairan laut Provinsi Riau yang masuk pada WPP-571 adalah perairan laut di wilayah Rokan Hilir, Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Siak, dan Kep. Meranti, dan yang masuk WPP-711 adalah perairan laut di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. sedangkan untuk usaha Perairan Umum Daratan (PUD) berada pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.

Berdasarkan data KepMen KP Nomor 19 Tahun 2022 tentang estimasi dan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan bahwa sebagian besar sumber daya ikan di perairan laut Provinsi Riau telah terjadi kondisi lebih tangkap (*over exploited*) untuk itu perlu dukungan Renja 2025 dalam pelaksanaan penangkapan ikan terukur (PIT), Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan, sehingga untuk mengantisipasi dalam penyelenggaraan PIT ini perlu dukungan teknis bagi nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan terukur, termasuk penggunaan alat tangkap yang terukur dan sistem pengukuran dan pelaporannya, serta membangun infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan kebijakan, seperti pelabuhan, dan dermaga.

Selain itu perlu dilakukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur ini. Namun untuk melindungi nelayan di Provinsi Riau harus ditindaklanjuti dengan langkah antisipasi yang efektif dan efisien oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, khususnya sebagai upaya untuk melindungi nelayan lokal dan nelayan kecil di wilayah pesisir yang masih kategori miskin perlu di persiapkan agar tidak terpinggirkan.

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengatasi masih maraknya kapal asing pencuri ikan di perairan Provinsi Riau. Saat ini jumlah armada yang terdata di Provinsi Riau adalah 14.285 unit, yang telah memiliki izin sebanyak pelaku usaha perikanan yang memiliki izin berjumlah 915 (Tahun 2023) pelaku usaha, dengan jumlah total nelayan yang saat ini terdata di Provinsi Riau adalah sebanyak 1.472 unit, ini artinya masih sekitar 10,30% hal ini salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pengurusan perizinan, masih minim pengetahuan pelaku usaha dalam mengakses proses perijinan secara online, serta masih banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki kelengkapan dokumen kapal seperti Pas Kecil/Pas Besar sehingga di perlukan pengawasan yang berkelanjutan dan komprehesif, sehingga di harapkan mampu untuk mengurangi pencurian ikan, serta meningkatkan ketataan hukum bagi pelaku usaha perikanan.

4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut. Provinsi Riau memiliki 2 (dua) kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu: 1) Kawasan Konservasi Perairan di Perairan Kepulauan Aruah dengan Keputusan Menteri Kelautan Nomor 73 Tahun 2021 dengan luasan 18.536,10 Ha, 2)Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107 Tahun 2023 dengan Luasan 126.097,64.

Sedangkan 2 (dua) kawasan lagi masih dalam proses penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu: 1)

Pencadangan Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Terubuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2012 dengan luasan 40.816 Ha; 2).Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Rupaat Utara dengan SK Gubernur Nomor Kpts. 565/II/2019 dengan luasan 15.547 Ha, dari data tersebut jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola di Provinsi Riau Tahun 2023.

Untuk rehabilitasi daerah pesisir dengan penanaman hutan mangrove dengan pendekatan partisipasi masyarakat, hutan mangrove bermanfaat untuk melindungi tanah di sekitar laut. Tanah akan menjadi lapisan yang lebih padat dengan adanya pohon bakau. Tanaman bakau yang tumbuh di tepian pantai akan membuat airnya jernih, serta tempat beraktivitas ikan dan udang. Kemudian Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, adalah untuk membuat dokumen pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil (TPK) Kepulauan Aruah Rokan Hilir.

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Perlu dilakukan pembinaan Unit Usaha Pengolahan Ikan yang saat ini di Provinsi Riau memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mikro kecil sebanyak 998 (sumber one data Tahun 2023), dari 998 UPI baru 1 % yang berskala menengah besar. Masih sangat sedikit jumlah UPI yang berskala menengah besar di Provinsi Riau disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah Mutu Produk Olahan Skala UMKM yang rendah, pengetahuan para pelaku usaha mikro dan kecil tentang standar mutu dan perizinan berusaha berbasis resiko masih rendah, terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD), tidak tersedianya *cold storage* milik Pemerintah untuk menampung hasil budidaya, tangkap dan pengolahan, belum tersedianya data harga ikan di seluruh Kabupaten / Kota serta belum optimalnya peningkatan angka konsumsi ikan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kepada UPI skala mikro kecil yang juga memiliki potensi dalam pengembangan produksi usaha di sektor perikanan.

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja ujuan,Sasaran,Program, (Outcome) dan Kegiatan (Out put)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							2025					2026	
							Lokasi	Target	Rp (juta)	Sumber Dana		Target	Rp (juta)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						NTN		105				106	
						NTPi		105				106	
					SEKRETARIAT								
3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	28.737.237.011			100%	30.352.614.262
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	150.000.000			1 Laporan	150.000.000
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50.000.000

3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	50.000.000
3	25	02	1.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pekanbaru	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50.000.000
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		5 Laporan	21.717.440.567			5 Laporan	24.717.817.818
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	143 Orang	21.717.440.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		143 Orang	24.717.817.818
3	25	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi		6 Jenis	350.000.000			1 Laporan	378.000.000
3	25	01	1,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	2 Dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	220.000.000
3	25	01	1,03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	14 Laporan	70.000.000	-		14 Laporan	70.000.000
3	25	01	1,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	14 Laporan	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 Laporan	88.000.000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi		6 Jenis	1.816.766.873			6 Jenis	1.396.766.873

3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	2 Paket	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	90.000.000
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	5 Paket	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	200.000.000
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	5 Paket	235.002.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	235.002.000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pekanbaru	15 Paket	103.300.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37 Paket	103.300.873
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	155 Laporan	1.138.464.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260 Laporan	738.464.000
3	25	02	1.07	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	11 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Dokumen	30.000.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 Jenis	3.547.549.151			2 Jenis	3.147.549.151
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pekanbaru	4 Laporan	2.169.992.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	1.769.992.995

3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	44 Laporan	1.377.556.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99 Laporan	1.377.556.156
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		2 Jenis	160.494.125			2 Jenis	160.494.125
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pekanbaru	14 Unit	135.494.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Unit	135.494.125
3	25	02	1.08	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pekanbaru	3 Unit	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	25.000.000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		27 Jenis	994.986.295			27 Jenis	401.986.295
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pekanbaru	27 Unit	267.166.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44 Unit	167.166.295
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pekanbaru	278 Unit	153.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		308 Unit	135.000.000
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekanbaru	1 Unit	574.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86 Unit	99.820.000

					BIDANG KELAUTAN PERIKANAN								
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)		280624 Ha	450.132.217			280.624 Ha	914.338.068
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)	Pekanbaru	18.539,1 Ha	450.132.217			205601,64 Ha	914.338.068
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Provinsi Riau	144633,73 Ha	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		201491,72 Ha	650.000.000
3	25	02	101	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Provinsi Riau	3 Ha	200.132.217	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Ha	264.338.068
					BIDANG TANGKAP								
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)		140.000 Ton	5.824.143.813			140.000 Ton	5.842.652.454
3	25	03	101		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan		3 Wilayah	3.451.561.170			3 Wilayah	3.925.995.811
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Riau	1 Dokumen	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	200.000.000

3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Riau	1 Unit	373.296.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	300.000.000
3	25	03	1.01	10	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Riau	1760 Unit	2.898.264.342	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1522 Unit	3.425.995.811
3	25	03	102		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan		4 Wilayah	2.159.550.000			4 Wilayah	1.680.000.000
3	25	03	102	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Riau	1 Dokumen	218.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	180.000.000
3	25	03	102	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0	Provinsi Riau	1545 0	1.940.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45 Unit	1.500.000.000
3	25	03	103		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan		170 Izin	213.032.643			180 Izin	236.656.643

3	25	03	103	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Sub sektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk Kapal ukuran diatas 5 GT- 30 GT dan Beroperasi sampai dengan 12 Mill	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Provinsi Riau	100 persen	137.307.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 persen	85.000.000
3	25	03	103	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Penangkapan dan Pengangkut Ikan ukuran diatas 5 GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mill	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Provinsi Riau	1 Dokumen	75.724.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	151.656.643
					BIDANG BUDIDAYA								
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Provinsi Riau	132712,51 Ton	3.589.505.105			134.039,63	2.506.663.000
3	25	04	101		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5 izin	20.000.000			5 izin	20.000.000
3	25	04	101	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Provinsi Riau	1 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	20.000.000

3	25	04	103		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan yang di terbitkan		3 izin	10.000.000			3 izin	20.000.000
3	25	04	103	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Provinsi Riau	1 Rekomendasi	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Rekomendasi	20.000.000
3	25	04	104		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah		100 Rekomendasi	70.000.000			3 Kawasan	70.000.000
3	25	04	104	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	250 Rekomendasi	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Rekomendasi	70.000.000
3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan		5 Kawasan	285.663.000			3 Kawasan	296.663.000
3	25	04	105	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	1 Dokumen	59.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	70.000.000

3	25	04	105	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Provinsi Riau	90 Orang	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90 Orang	125.000.000
3	25	04	105	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Provinsi Riau	10 Unit	101.663.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Unit	101.663.000
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan		5 Kawasan	3.203.842.105			5 Kawasan	2.100.000.000
3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SaranaPembudidayaan Ikan di AirPayau dan Air Tawar LintasDaerah Kabupaten/Kota		88 Unit	2.600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Unit	1.100.000.000
3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	5 Unit	603.842.105	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	1.000.000.000
					Bidang P2HKP								
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)	Provinsi Riau	29.845,28	800.066.418,00			30.714,56	724.366.418,00

3	25	06	101		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil yang diterbitkan		6	50.000.000,00	-		6	50.000.000,00
3	25	06	101	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Provinsi Riau	6 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Rekomendasi	50.000.000,00
3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan		4 Unit	750.066.418	-		4 Unit	674.366.418
3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	2 Kegiatan	691.866.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Kegiatan	616.866.418

3	25	06	102	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Provinsi Riau	1 Kegiatan	58.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Kegiatan	57.500.000
					BIDANG KP								
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	Provinsi Riau	7 Kasus	119.999.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Kasus	240.000.000
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi		245 Pelaku Usaha	20.000.000	-		270 Pelaku Usaha	40.000.000
3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Provinsi Riau	2 Forum	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Forum	40.000.000
3	25	05	102		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diterawasi		40 Pelaku Usaha	99.999.999	-		40 Dokumen	200.000.000

3	25	05	102	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Riau	10 Pelaku Usaha	39.999.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	100.000.000
3	25	05	102	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Riau	20 Pelaku Usaha	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Dokumen	100.000.000
					UPT.PSDKP WIL 1				775.098.566				636.438.654
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	378.342.766			100%	231.438.654
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi		6 Jenis	145.555.906	-		6 Jenis	91.321.094
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Indragiri Hilir	9 Paket	43.823.906	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	23.084.900
3	25	01	1.06	'0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Indragiri Hilir	16 Paket	10.032.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	10.040.000

3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Indragiri Hilir	11 Paket	2.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37 Paket	1.736.194
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	31 Laporan	88.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260 Laporan	56.460.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 Jenis	207.514.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Jenis	106.170.240
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Indragiri Hilir	7 Laporan	207.514.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99 Laporan	106.170.240
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	25.272.300			27 Jenis	33.947.320
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Indragiri Hilir	2 Unit	15.332.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44 Unit	23.947.320
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Indragiri Hilir	13 Unit	9.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86 Unit	10.000.000

3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	Provinsi Riau	7 kasus	396.755.800			7 kasus	405.000.000
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi		80	396.755.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80	405.000.000
3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	5 Pelaku Usaha	16.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Pelaku Usaha	30.000.000
3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	30 Pelaku Usaha	352.595.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Pelaku Usaha	345.000.000
3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	8 Pelaku Usaha	27.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Pelaku Usaha	30.000.000
					UP.PSDKP WIL 2				1.061.304.620				677.778.528
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	474.179.467	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	302.778.528
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)		6 Jenis	223.948.427	-		6 Jenis	116.165.896

3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	6 Paket	113.561.087	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	70.618.140
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	5 Paket	17.664.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	7.728.000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	2 Paket	6.023.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37 Paket	2.599.756
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkalis	12 Laporan	86.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260 Laporan	35.220.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 Jenis	208.721.040			2 Jenis	118.717.632
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	5 Laporan	208.721.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99 Laporan	118.717.632
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	41.510.000	-		27 Jenis	67.895.000

3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Bengkalis	2 Unit	22.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44 Unit	17.895.000
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bengkalis	3 unit	19.510.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		308 Unit	50.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani		7 kasus	587.125.153			7 kasus	375.000.000
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi		80 Pelaku Usaha	587.125.153			270 Pelaku Usaha	375.000.000
3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	10 Pelaku Usaha	47.790.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Pelaku Usaha	30.000.000
3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	180 Pelaku Usaha	539.335.153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Pelaku Usaha	345.000.000
					UPT.PSDKP WIL 3				1.043.840.652				819.246.089
3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	447.968.652			100%	390.245.609
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi		6 Jenis	71.701.896	-		6 Jenis	58.751.896

3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	6 Paket	20.357.774	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	20.357.774
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	5 Paket	7.728.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	7.728.000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	5 Paket	2.031.122	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37 Paket	2.031.122
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Rokan Hilir	10 Laporan	41.585.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260 Laporan	28.635.000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		2 Jenis	58.440.700			2 Jenis	58.374.433
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	8 Unit	58.440.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Unit	58.374.433
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 Jenis	231.515.456	-		2 Jenis	176.869.968
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	8 Laporan	231.515.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99 Laporan	176.869.968
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	86.310.600	-		27 Jenis	96.249.312

3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Rokan Hilir	1 Unit	21.310.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44 Unit	11.249.312
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Rokan Hilir	3 Unit	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		308 unit	80.000.000
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Rokan Hilir	9 Unit	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86 Unit	5.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)		85 Pelaku Usaha	595.872.000			270 Pelaku Usaha	429.000.480
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi		85	595.872.000			105	429.000.480
3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	8 Pelaku Usaha	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Pelaku Usaha	30.000.000

3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	75 Pelaku Usaha	535.872.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Pelaku Usaha	369.000.480
3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	5 Pelaku Usaha	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Pelaku Usaha	30.000.000
					UPT.Budidaya Perikanan				3.973.043.001				2.881.299.099
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.304.681.989			100%	1.032.822.852
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi		4 Jenis	145.098.189	-		4 Jenis	145.098.189
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	6 Paket	42.710.794	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	42.710.794
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	6 Paket	12.387.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	12.387.395

3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pekanbaru	6 Paket	12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37 Paket	12.000.000
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	28 Laporan	78.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260 Laporan	78.000.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 Jenis	982.308.480			2 Jenis	702.490.663
3	25	01	1.08	'0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	18 Laporan	982.308.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99 Laporan	702.490.663
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	177.275.320	-		27 Jenis	185.234.000
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pekanbaru	3 Unit	102.275.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44 Unit	105.234.000

3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pekanbaru	15	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		308 Unit	80.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)		132712,51 Ton	2.668.361.012			132712,51 Ton	1.848.476.247
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan		5 Kawasan	2.668.361.012			5 Kawasan	1.848.476.247
3	25	04	106	03	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SaranaPembudidayaan Ikan di AirPayau dan Air Tawar LintasDaerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru	8 unit	2.668.361.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 unit	1.848.476.247
					UPT.PMHP				592.546.998				682.946.442
3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	388.448.416			100%	394.436.312
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)		6 Jenis	39.862.064	-		6 Jenis	28.672.064
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	5 Paket	9.972.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	9.972.206

3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai	4 Paket	2.139.858	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37 Paket	2.139.858
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	4 Laporan	27.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260 Laporan	16.560.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 jenis	289.412.514			2 jenis	289.740.410
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	10 Laporan	289.412.514,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99 Laporan	289.740.410,00
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	59.173.838	-		27 Jenis	76.023.838
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Riau	3 Unit	21.023.838	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44 Unit	21.023.838
3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai	3 Unit	13.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		308 Unit	50.000.000

3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		9 Unit	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86 Unit	5.000.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan	Provinsi Riau	29.845,28	204.098.582	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.714,56	288.510.130
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan		4 Unit	204.098.582			4 Unit	288.510.130
3	25	06	102	0004	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	10 kegiatan	204.098.582	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 kegiatan	288.510.130
					UPT.PELABUHAN PERIKANAN		Kota Dumai		1.136.482.804				16.531.172.046
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	936.482.804	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	815.945.046
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)		6 Jenis	134.251.355	-		6 Jenis	125.696.784

3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	6 Paket	16.816.639	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	14.966.401
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	11.200.000	-		5 Paket	4.771.943
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	9.864.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37 Paket	9.868.440
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	96.370.000	-		260 Laporan	96.090.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 Jenis	432.852.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Jenis	384.867.120
3	25	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Laporan	432.852.800	-		99 Laporan	384.867.120
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	369.378.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27 jenis	305.381.142
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Dumai	3 Unit	73.440.000	-		44 Unit	49.381.142

3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai	5 Unit	147.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		308 Unit	250.000.000
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Dumai	1 Unit	148.088.649	-		86 Unit	6.000.000
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		140000 Ton	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140000 Ton	15.715.227.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	Kota Dumai	1 Unit	200.000.000	-		1 Unit	15.715.227.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Kota Dumai	1 Unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	15.715.227.000
									48.103.401.204				62.809.515.060

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah). Pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 48.103.401.204,- dengan 6 program dan 22 kegiatan, 89 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 8
Capaian Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja ujuan,Sasaran, Program, (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2022)	Pagu Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Perencanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2025			
													Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5					6	5	6	7	8	9	14	15
Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Inklusif	Meninngkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatam	Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan							NTN	104,54		105			
										NTPi	98,65		105			
									SEKRETARIAT							
				3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	28.737.237.011		
				3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		-	1 Laporan	150.000.000		
				3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru

				3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	
				3	25	02	1.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dokumen	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	
				3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	21.543.771.408	5 Laporan	21.717.440.567			
				3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	21.543.771.408	143 Orang	21.717.440.567	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	
				3	25	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	1 Laporan	80.925.000	6 Jenis	350.000.000			
				3	25	01	1,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	

				3	25	01	1,03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			14 Laporan	70.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	80.925.000	14 Laporan	80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	1.263.535.694	6 Jenis	1.816.766.873		
				3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	90.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		186.670.385	5 Paket	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	235.007.000	5 Paket	235.002.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	103.301.809	15 Paket	103.300.873	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205 Laporan	738.556.500	155 Laporan	1.138.464.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru

				3	25	02	1.07	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			11 Dokumen	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	2.444.192.376	2 Jenis	3.547.549.151		
				3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.066.636.220	4 Laporan	2.169.992.995	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	1.377.556.156	44 Laporan	1.377.556.156	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis	135.925.877	2 Jenis	160.494.125		
				3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	135.925.877	14 Unit	135.494.125	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	02	1.08	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru

				3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	27 Jenis	266.986.295	27 Jenis	994.986.295		
				3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	167.166.295	27 Unit	267.166.295	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			278 Unit	153.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.820.000	1 Unit	574.820.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
									BIDANG KELAUTAN PERIKANAN							
				3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)	2		280624 Ha	450.132.217		#REF!
				3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)		509.180.005	18.539,1 Ha	450.132.217	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	280.494		144633,73 Ha	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

				3	25	02	101	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	5	509.180.005	3 Ha	200.132.217	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
									BIDANG TANGKAP							
				3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	134.972,83	5.512.360.140	140.000 Ton	5.824.143.813		
				3	25	03	101		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	3	3.858.179.915	3 Wilayah	3.451.561.170		
				3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0		1 Dokumen	180.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0		1 Unit	373.296.828	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	03	1.01	10	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2647	3.858.179.915	1760 Unit	2.898.264.342	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

				3	25	03	102		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah perikanan tangkap diperaikan umum daratan yang dimanfaatkan	-	1.654.180.225	4 Wilayah	2.159.550.000		
				3	25	03	102	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0		1 Dokumen	218.920.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	03	102	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0	82	1.654.180.225	1545 0	1.940.630.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	03	103		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan	120		170 Izin	213.032.643		
				3	25	03	103	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Sub sektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk Kapal ukuran diatas 5 GT- 30 GT dan Beroperasi sampai dengan 12 Mill	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			100 persen	137.307.648	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

				3	25	03	103	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Penangkapan dan Pengangkut Ikan ukuran diatas 5 GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mill	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	0		1 Dokumen	75.724.995	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
									BIDANG BUDIDAYA							
				3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	121.485,31		132712,51 Ton	3.589.505.105	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	04	101		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	5 izin	20.000.000		
				3	25	04	101	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko			1 Dokumen	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

				3	25	04	103		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan		-	3 izin	10.000.000		
				3	25	04	103	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan			1 Rekomendasi	10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	04	104		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah	3 Kawasan	-	100 Rekomendasi	70.000.000		
				3	25	04	104	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			250 Rekomendasi	70.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

				3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan		142.009.000	5 Kawasan	285.663.000		
				3	25	04	105	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	59.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	04	105	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		90 Orang	125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	04	105	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	15	142.009.000	10 Unit	101.663.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	5 Kawasan	-	5 Kawasan	3.203.842.105		
				3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			88 Unit	2.600.000.000		

				3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			5 Unit	603.842.105	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
									Bidang P2HKP							
				3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)	16.312,77		29.845,28	800.066.418,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	06	101		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil yang diterbitkan		-	6	50.000.000,00		
				3	25	06	101	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	0		6 Dokumen	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

				3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	0	1.747.797.105	4 Unit	750.066.418		
				3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0	1.747.797.105	2 Kegiatan	691.866.418	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	06	102	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk	0	1.747.797.105	1 Kegiatan	58.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

									yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko							
									BIDANG KP							
				3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	20		7 Kasus	119.999.999	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	-		245 Pelaku Usaha	20.000.000		
				3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan			2 Forum	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

				3	25	05	102		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diterawasi	0		40 Pelaku Usaha	99.999.999		
				3	25	05	102	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		10 Pelaku Usaha	39.999.999	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	05	102	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	22		20 Pelaku Usaha	60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
									UPT. PSDKP WIL 1					775.098.566		

				3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	378.342.766		
				3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	91.433.000	6 Jenis	145.555.906		
				3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	23.086.000	9 Paket	43.823.906	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
				3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.050.000	16 Paket	10.032.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
				3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1.737.000	11 Paket	2.770.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
				3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	56.560.000	31 Laporan	88.930.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
				3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	107.376.720	2 Jenis	207.514.560		

				3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	107.376.720	7 Laporan	207.514.560	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
				3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	23.947.900	3 Jenis	25.272.300		
				3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	23.947.900	2 Unit	15.332.300	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
				3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		13 Unit	9.940.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
				3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	<u>20</u>	-	7 kasus	396.755.800	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	50		80	396.755.800		

				3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		5 Pelaku Usaha	16.760.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan
				3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		30 Pelaku Usaha	352.595.800	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan
				3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usahapemanfaatan sumber dayakelautan yang diperiksakepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		8 Pelaku Usaha	27.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan
									UPT. PSDKP WIL 2					1.061.304.620		
				3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	474.179.467		
				3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	116.188.960	6 Jenis	223.948.427		

				3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	70.641.204	6 Paket	113.561.087	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
				3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.728.000	5 Paket	17.664.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
				3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	2.599.756	2 Paket	6.023.340	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
				3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	35.220.000	12 Laporan	86.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
				3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	119.682.816	2 Jenis	208.721.040		
				3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	119.682.816	5 Laporan	208.721.040	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
				3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	17.895.000	3 Jenis	41.510.000		

				3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	17.895.000	2 Unit	22.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
				3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		3 unit	19.510.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
				3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	3		7 kasus	587.125.153		
				3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mil yang diawasi	50		80 Pelaku Usaha	587.125.153		
				3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			10 Pelaku Usaha	47.790.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti
				3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			180 Pelaku Usaha	539.335.153	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti
									UPT.PSDKP WIL 3					1.043.840.652		

				3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	447.968.652		
				3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	58.968.992	6 Jenis	71.701.896		
				3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	20.358.912	6 Paket	20.357.774	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
				3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	7.728.000	5 Paket	7.728.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
				3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.032.080	5 Paket	2.031.122	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
				3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	28.850.000	10 Laporan	41.585.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
				3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis	58.375.401	2 Jenis	58.440.700		
				3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	58.375.401	8 Unit	58.440.700	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir

				3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	176.869.968	3 Jenis	231.515.456		
				3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	176.869.968	8 Laporan	231.515.456	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
				3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	11.250.000	3 Jenis	86.310.600		
				3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	11.250.000	1 Unit	21.310.600	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
				3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		3 Unit	60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
				3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		9 Unit	5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
				3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	20		85 Pelaku Usaha	595.872.000		

				3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	50		85	595.872.000		
				3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			8 PelakuUsaha	30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
				3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			75 Pelaku Usaha	535.872.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
				3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		5 Pelaku Usaha	30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan
									UPT.Budidaya Perikanan			1.499.742.172		3.973.043.001		
				3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	658.628.977	100%	1.304.681.989		

				3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	4 Jenis	121.098.189	4 Jenis	145.098.189		
				3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.710.794	6 Paket	42.710.794	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.387.395	6 Paket	12.387.395	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	6 Paket	12.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	65.000.000	28 Laporan	78.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis	495.380.688	3 Jenis	982.308.480		
				3	25	01	1.08	'0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	495.380.688	18 Laporan	982.308.480	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru

				3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	42.150.100	3 Jenis	177.275.320		
				3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	42.150.100	3 Unit	102.275.320	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		15	75.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
				3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	121.485,31	841.113.195	132712,51 Ton	2.668.361.012		
				3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	5 Kawasan	841.113.195	5 Kawasan	2.668.361.012		

				3	25	04	106	03	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		841.113.195	8 unit	2.668.361.012	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
									UPT.PMHP			299.846.472		592.546.998		
				3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	299.846.472	100%	388.448.416		
				3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	28.672.064	6 Jenis	39.862.064		
				3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	9.972.206	5 Paket	9.972.206	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.139.858	4 Paket	2.139.858	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	16.560.000	4 Laporan	27.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai

				3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 jenis	250.150.570	2 jenis	289.412.514		
				3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	250.150.570	10 Laporan	289.412.514,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	21.023.838	3 Jenis	59.173.838		
				3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	21.023.838	3 Unit	21.023.838	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit		3 Unit	13.150.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		9 Unit	25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

				3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan	16.312,77		29.845,28	204.098.582	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
				3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan			4 Unit	204.098.582		
				3	25	06	102	0004	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1		10 kegiatan	204.098.582	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
									UPT. Pelabuhan Perikanan			3.478.881.102		1.136.482.804	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	426.794.456	100%	936.482.804		

				3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	62.953.215	6 Jenis	134.251.355		
				3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.625.215	6 Paket	16.816.639	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	9.348.000	1 Paket	11.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3.000.000	1 Paket	9.864.716	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	34.980.000	1 Laporan	96.370.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	316.741.216	3 Jenis	432.852.800		
				3	25	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	316.741.216	1 Laporan	432.852.800	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	47.100.025	3 Jenis	369.378.649		

				3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	47.100.025	3 Unit	73.440.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit		5 Unit	147.850.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		1 Unit	148.088.649	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	147.176,78	3.052.086.646	140000 Ton	200.000.000		
				3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	1	3.052.086.646	1 Unit	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
				3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2	3.052.086.646	1 Unit	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
												39.707.141.403		48.103.401.204		

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara Kelembagaan dalam pelaksanaan Program kegiatan pada Tahun 2025, urusan pemerintah bidang kelautan.

Dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, masih dijumpai permasalahan/kendala baik eksternal maupun internal yang harus dicarikan solusinya. Beberapa permasalahan strategis tersebut antara lain terkait dengan manajemen perencanaan kinerja yang masih ditemui sepanjang tahun 2023 yaitu: (1) masih terjadi perubahan indikator dokumen Renstra, sehingga dokumen kinerja yang disusun tidak konsisten; (2) Masih terdapat inkonsistensi dalam dokumen Rencana Kerja, dan penyusunan RKA pada angka pencapaian target kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan.

Dengan masih besarnya Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal maka dengan adanya dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk Tahun 2025, dapat memberi acuan kerja dalam mendukung program pemerintah daerah maupun pusat dalam melaksanakan program kegiatan kedepan, meningkatkan kinerja aparatur, sasaran dan target yang akan dicapai serta mengevaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Riau tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadikan komitmen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai pemegang amanah dan stakeholder untuk bersama-sama menciptakan *good governance* dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 berpengaruh oleh APBD maka program dan kegiatan akan di prioritaskan untuk berkaitan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi misi yang di dukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini di buat untuk mejadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Pekanbaru, Februari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU



YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/lvc
NIP. 1971 0417 200212 1006



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Pattimura No. 6 Telp. (0761) 22921 – 34685, Fax. (0761) 23191
PEKANBARU – 28131

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 000.7.2/DKP-Sekr/2024/I/04

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 Dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
- b. Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
- d. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 Dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024;
- e. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
- d. Perumusan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan RKPD;
- f. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 Dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Provinsi Riau.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 05 Januari 2024



**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU,**

**YURNALIS, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.19710417 200212 1 006**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
Nomor : 000.7.2/DKP-Sekr/2024/I/04
Tanggal : 05 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSIN RIAU TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL
1.	Ketua Tim	YURNALIS, S.Sos, M.Si NIP. 19710417 200212 1 006	Kepala Dinas
2.	Sekretaris Tim	FAJRIYANI, SE, M.Si NIP. 19720309 200212 2 002	Sekretaris
3.	Sekretariat		
	- Koordinator	DEDI ERIANTO, S.Pi. M.Si NIP. 19800818 201102 1 001	Perencana Ahli Muda
	- Anggota 1	ITJE LESTARI, S.Si, M.Si NIP.19820823 201102 2 001	Perencana Ahli Muda
	- Anggota 2	TANTI EKASARI, S.S, M.Si NIP.19800524 200903 2 002	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	- Anggota 3	MARDIANIS, SST, M.Kes NIP. 19790707 201001 2 017	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4.	Kelompok Kerja Bidang Perikanan Budidaya		
	- Koordinator	SAPTA RAHMAWATI, S.Pi NIP. 19691012 199803 2 006	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
	- Anggota 1	NENNY INDRAWATY, S.Pi, M.Si 19760412 201001 2 002	Analisis Akuakultur Ahli Muda
	- Anggota 2	MULYADI, S.Pi, M.Si NIP. 19720427 200801 1 008	Analisis Akuakultur Ahli Muda
	- Anggota 3	Ir. LASTRIMEI SITUMEANG NIP. 19670524 199403 2 004	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda
5.	Kelompok Kerja Bidang Perikanan Tangkap		
	- Koordinator	HUMARDANI, S.Pi NIP. 19740313 199903 1 003	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
	- Anggota 1	RENNY DEVI, S.Pi NIP. 19740816 199903 2 003	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
	- Anggota 2	NUSRAWATI, S.Pi NIP. 19761107 201001 2 004	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda

6.	Kelompok Kerja Bidang P2HKP		
	- Koordinator	WIWIK PUJI RAHAYU, S.Pi, M.Si NIP. 19700508 199703 2 004	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
	- Anggota 1	Ir. YANTI AGUSTINA, M.Si NIP. 19670831 199303 2 004	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda
	- Anggota 2	YARNI RIZAL, S.Pi NIP. 19750129 199903 2 002	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda
7.	Kelompok Kerja Bidang Kelautan dan Pengawasan		
	- Koordinator	M HASSANALLUTFI, S.STP NIP. 19841021 200212 1 001	Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan
	- Anggota 1	ZULMASRI, S.Pi, M.Si NIP. 19730701 200604 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda
	- Anggota 2	APRILLA YUNITA, S.Pi, M. Si NIP. 19780415 201102 2 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda
	- Anggota 3	DEDEK PURWANTO, S.Si NIP. 19800520 201102 1 002	Pengawas Perikanan Ahli Muda
8.	Kelompok Kerja UPT. Pelabuhan Perikanan		
	- Koordinator	INDRA RAHMAN, S. STP, M. Si NIP. 19841111 200412 1 001	Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan
	- Anggota 1	SUSILAWATI, S. Pi NIP. 19800607 200502 2 003	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	Ir. BERNADINE NIP. 19680630 199403 1 008	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
	- Anggota 3	MUHAMMAD GILANG SATRIA, S.STP, M.Si NIP. 19930223 201609 1 001	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
9.	Kelompok Kerja UPT.Budidaya Perikanan		
	- Koordinator	AKHBAR WISARDI, S.STP, M.Si NIP. 19901229 201206 1 002	Kepala UPT Budidaya Perikanan
	- Anggota 1	LUCKY SYARIF, S.Pi NIP. 19840822 201001 2 012	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	M. SYUKRI RAIS, S.Pi NIP. 19690523 200701 1 005	Kepala Seksi Teknis Pembenihan
	- Anggota 3	SASPRIJON, S.Pi NIP. 19790507 200801 1 018	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan

10.	Kelompok Kerja UPT.PMHP		
	- Koordinator	SALMAN, S.Pi, M.Si NIP. 19700411 199703 1 006	Kepala UPT PMHP
	- Anggota 1	ASIH YULIATI, S.Sos NIP. 19830708 200801 2 007	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	PANJI SUTRISNO, S.STP NIP. 19850730 200312 1 002	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan
	- Anggota 3	SINWANUS, S.Pi, M.Si NIP. 19820321 201102 1 001	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan
11.	Kelompok Kerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I		
	- Koordinator	SYAHJURI, ST, MH NIP. 19760101 200501 1 008	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Prikanan Wilayah I
	- Anggota 1	ROSNAH, SE, MM NIP. 19851219 201001 2 012	Kepala Subbagian Tata usaha
	- Anggota 2	SURYADI, S.Pi NIP. 19780222 201102 1 001	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
	- Anggota 3	APRIANSYAH, S.Pi NIP. 19730430 200604 1 012	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
12.	Kelompok Kerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II		
	- Koordinator	ELDY SYAHPUTRA, S.Pi, M.Si NIP. 19690909 200212 1 006	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Prikanan Wilayah II
	- Anggota 1	EKO RISWANTO, S.STP, MP NIP. 19800324 199810 1 002	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	SAID ABDULLAH, S.Pi NIP. 19850604 201102 1 002	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
	- Anggota 3	RUDY HARTONO, A.Md NIP. 19700516 19944031001	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

13.	Kelompok Kerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III		
	- Koordinator	Ir. HASMAN DAYAT, M.Si NIP. 19670820 199403 1 004	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III
	- Anggota 1	WILLY IRAWAN, S.Pi NIP. 19751024 200701 1 017	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	MARAHALIM, A.Pi, M.Si NIP. 19730224 199803 1 005	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
	- Anggota 3	HIDAYAT, S.Pi NIP. 19780511 201102 1 001	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 05 Januari 2024

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU,**

YURNALIS, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.19710417 200212 1 006

TABEL VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2025

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	√		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	√		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	√		
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	√		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	Capaian Renstra Perangkat Daerah	2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29			
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30	√		
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam per	√		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahu direncanakan			
	2.4 Review terhadap RKPD	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31 	√		
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; ii. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; iii. Sajikan Tabel T-C.32 	√		
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <p>Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</p>	√		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan 	√		

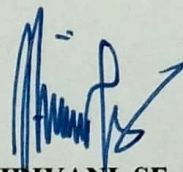
NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	Perangkat Daerah	fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	√		
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33	√		-
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	√		
5	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut;	√		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.			
6	LAMPIRAN	1. Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan renstra perangkat daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2025) 2. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025	√		

Pekanbaru,

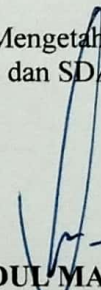
2024

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Sekretaris



FAJRIYANI, SE, M. Si
NIP. 19720309 200212 2 005

Mengetahui,
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappedalitbang Provinsi Riau



ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006

Verifikator :

1. **RIZKY RACHMAWATI**
NIP. 19800331 200903 2 002

2. **MEI RENI PAKPAHAN**
NIP. 19800511 201102 2 002

